

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten di Jawa Tengah

The Effect of Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures in Regencies in Central Java

Nurul Fitriyani¹, Hilda Kumala Wulandari², Roni³, Andi Yulianto⁴, Slamet Bambang Riono⁵

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

^{4,5}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

e-mail: ¹nurul.mahendra420@gmail.com, ²hilda060791@gmail.com, ³roni.umus18@gmail.com, ⁴andiyulianto@umus.ac.id, ⁵sbriyono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dana alokasi umum (DAU) dan belanja modal pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menerapkan data sekunder. Populasi penelitian yakni laporan belanja modal pemerintah daerah kabupaten atau kota pada provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2019-2020 yang terdiri 35 kabupaten/kota. Sampel penelitian ini adalah laporan belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Brebes yang laporan realisasi APBD-nya tercantum dalam laporan realisasi APBD tahun 2019-2020 dan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berdampak positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Alokasi Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to determine the impact or influence of local original income (PAD) of the general allocation fund (DAU) and capital expenditure on districts or cities in Central Java Province. This research is a quantitative study by applying secondary data. The research population is a report on the capital expenditure of the district or city government in Central Java province starting from 2019-2020 consisting of 35 regencies/cities. The sample of this study is the capital expenditure report of the local government of Brebes Regency whose APBD realization report is listed in the 2019-2020 APBD realization report and uses purposive sampling. The analysis technique utilized in this study is multiple linear regression with the help of the SPSS application. From the results of the study, it was revealed that the variables of Regional Original Income and General Allocation Fund had a significant positive impact on Capital Expenditure.

Keywords: Capital Expenditure Allocation, General Allocation Fund, Local Revenue

PENDAHULUAN

Pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah tentang otoritas publik melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU dengan peraturan independensi regional memberikan perjanjian bahwa setiap wilayah perlu melampaui semua kebutuhan. Yang terkait dengan kegiatan dalam layanan menyediakan fasilitas dan perkembangan Infrastruktur yang merupakan kewajiban masing-masing pemerintah daerah [1]. Selain itu, dengan fokus layanan pemerintah kepada masyarakat, masyarakat dapat menyaring dan mengendalikan penggunaan aset yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan pengeluaran Saat melakukan layanan kepada masyarakat [2]. Persiapan alokasi dan realisasi di APBD adalah yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah beberapa komponen, yaitu pendapatan regional PAD dan menyeimbangkan dana yang berisi Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Belanja Modal (ABM)

dll[3]. Pengeluaran yang berisi dalam pengeluaran regional, tidak dapat berpisah dari sumber pendapatan, baik dalam bentuk pinjaman daerah, pendapatan asli daerah atau dana keseimbangan[4]. Dana saldo adalah dana yang diperoleh dari anggaran negara yang terdiri dari dana alokasi umum dan belanja modal, sedangkan PAD itu sendiri adalah dana [5]. PAD adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya ekonomi [6]. Semakin tinggi kapasitas wilayah untuk mendapatkan pendapatan asli wilayahnya, semakin besar kegiatan pengeluaran daerah. Semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan dari pusat[7]. Semakin besar tawaran dan akuisisi layanan dan fasilitas publik melalui pengeluaran modal regional. Berdasarkan riset sebelumnya pada dana penugasan umum, ada beberapa hasil tidak konsisten[8]. Riset sebelumnya adalah bahwa dana penugasan umum memiliki efek positif pada pengeluaran modal. Sementara bahwa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memiliki efek negatif pada pengeluaran modal[9]. Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang membentuk dasar implementasi layanan publik[10]. Salah satu bentuk alokasi dana adalah pengeluaran modal[11]. Pengeluaran Modal sebagai bagian dari pengeluaran daerah untuk membangun dan menyediakan infrastruktur, infrastruktur, dan fasilitas publik melalui pembelian barang-barang berwujud dalam bentuk aset tetap dengan lebih dari satu tahun[12]. Pengeluaran modal, yang merupakan salah satu pengeluaran daerah, harus diperhitungkan karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan fasilitas[13]. menjelaskan bahwa untuk penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, DAU dimaksudkan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, yaitu melalui fasilitas publik yang nantinya akan meningkatkan biaya modal [14].

Pengeluaran modal menurut SAP adalah. pengeluaran yang dibuat dalam konteks pembentukan modal yang menambah aset atau inventaris tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran biaya pemeliharaan yang mempertahankan atau menambah dan tingkatkan masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset[15]. Pengeluaran modal yang rendah dapat mempengaruhi kinerja beberapa lembaga pemerintah[16]. Pengeluaran modal adalah sesuatu yang penting untuk meningkatkan ekonomi, jadi dalam hal ini perlu untuk campur tangan dalam layanan pemerintah termasuk rendahnya tingkat pencairan[17]. Di era desentralisasi fiskal, peningkatan layanan di beberapa sektor diharapkan, terutama di sektor publik. Tentu saja, harapan ini dapat dilakukan jika ada upaya pemerintah untuk menyediakan beberapa fasilitas investasi[18]. Awal implementasi desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah dimulai pada awal 2001. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 untuk melaksanakan otoritas Pemda. Pemerintah pusat akan mentransfer dana penyeimbangan yang terdiri dari DAU. Selain itu, sumber pendanaan lainnya dalam bentuk PAD, pembiayaan, dan pendapatan lainnya. Di antara jumlah dana keseimbangan yang telah dijelaskan, dana alokasi umum dianggap lebih banyak digunakan dan lebih fleksibel, sehingga penggunaan yang tepat dalam penggunaan optimalnya, DAU benar-benar dapat menjadi kekuatan pendorong bagi ekonomi daerah[19]. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan penugasan pengeluaran yang lebih besar untuk tujuan tersebut Salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pengeluaran modal [16].

Peningkatan PAD diharapkan mendorong investasi dalam modal pengeluaran pemerintah daerah sehingga kualitas layanan publik [11]. Karakteristik independensi regional dapat dilihat dari PAD yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. tetapi masih ada banyak daerah yang masih bergantung pada sumber pendanaan daerah pada dana transfer. Perbandingan proporsi DAU dengan PAD masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya, termasuk PAD. DAU ini dapat menyebabkan berbagai masalah yang dapat dilihat dalam hal perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memahami fungsi DAU, di mana pemerintah pusat mentransfer dana untuk menyamakan tingkat keuangan antardaerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengamati masalah dan mengkaji lebih dalam lagi tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah”. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya, apakah PAD berpengaruh terhadap belanja modal, apakah DAU berpengaruh terhadap belanja modal, apakah PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja modal, mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal, mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal.

KAJIAN LITERATUR

Stewardship Theory, ini juga disebut sebagai teori manajemen yang menjelaskan kapan seorang manajer bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya dengan berjuang secara optimal keinginan dan kepentingan utama dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri, bersikap jujur dan berintegrasi ke pihak lain. Teori *Stewardship* ini melihat bagaimana manajemen dalam suatu organisasi diasumsikan sebagai pelayan yang bekerja dengan integritas dan penuh tanggung jawab berdasarkan tujuan organisasi[20]. Menurut Perméndagri No 59/2007 tentang arahan untuk manajemen keuangan daerah PAD adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum yang meningkatkan ekuitas adalah hak regional selama latihan dan tidak perlu dibayar lagi oleh wilayah. PAD meliputi: pendapatan daerah, penyeimbangan dana, pendapatan regional yang sah lainnya. Setelah otonomi regional, pemerintah pusat memberikan lebih banyak wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan regionalnya sendiri[21]. Menurut UU No. 33 tahun 2004, pendapatan daerah adalah hukum pemerintah daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai bersih periode yang bersangkutan, pendapatan asal regional adalah pendapatan dari sumber daya ekonomi pendapatan daerah adalah salah satu komponen dari APBD[10].

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, dana alokasi umum adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang ditugaskan dengan tujuan kapasitas keuangan yang adil antara daerah untuk membiayai kebutuhan regional dalam konteks implementasi desentralisasi[22]. DAU adalah komponen terbesar dalam neraca dan perannya sangat strategis dalam penciptaan ekuitas dan keadilan antar wilayah, proporsi substansial dan penggunaan penggunaannya yang luas juga akan memberikan makna otonomi yang lebih signifikan untuk implementasi pemerintah daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, jumlah total DAU ditetapkan setidaknya 26% dari laba bersih yang ditentukan dalam APBN, DAU untuk suatu daerah ditugaskan berdasarkan kesenjangan fiskal dan penugasan dasar[23].

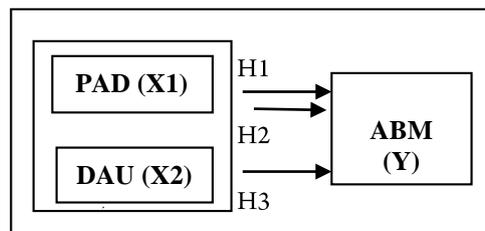
Kegiatan pengembangan infrastruktur daerah dikenal sebagai pengeluaran modal. Menurut PP No. 71 tahun 2010, pengeluaran modal adalah biaya pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun fiskal dan aset atau kekayaan regional. akan meningkat dan kemudian meningkatkan pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok -kelompok pengeluaran administrasi umum. Pengeluaran modal dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori utama yaitu: biaya modal dari peralatan tanah, modal dan mesin, biaya modal dan konstruksi modal, jalan dan jaringan irigasi biaya modal, pengeluaran modal fisik lainnya. PAD dapat menambah tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan regional yang diperoleh, semakin mungkin daerah tersebut memenuhi kebutuhan pembelian mereka sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat, yang berarti bahwa daerah tersebut dapat mandiri, dan dan Sebaliknya[24]. Menurut teori agensi, ada dalam organisasi masyarakat dan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) bertindak sebagai agen dan masyarakat yang diproyeksikan melalui DPRD. Pendapatan asli daerah memengaruhi proses anggaran biaya pemerintah daerah sebelumnya[25]. Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki efek atau berpengaruh positif, yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal[26].

H₁: PAD berpengaruh secara parsial positif signifikan terhadap anggaran belanja modal. DAU yaitu, dana asli dari anggaran negara yang ditugaskan dengan tujuan ekuitas keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran mereka dalam konteks implementasi

desentralisasi[27]. Oleh karena itu, ada transfer yang signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, menugaskan dan untuk alokasi biaya modal. Menurut teori agensi antara pemerintah pusat sebagai (direktur dan agen pemerintah daerah). Dalam hal ini, alokasi umum dana transfer dana pemerintah pusat ini kepada pemerintah daerah sehingga mereka dapat menggunakan dana ini untuk kegiatan regional yang ditugaskan untuk biaya modal. Peneliti sebelumnya yang dilakukan [28]. DAU memiliki efek positif pada belanja modal, memberikan hasil yang sama yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal[29].

H₂: DAU berpengaruh secara parsial positif signifikan terhadap anggaran belanja modal. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi belanja khususnya untuk belanja modal itu sendiri. Bila disesuaikan dengan Teori Agensi (Jensen dan Meckling) bahwa hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal. Pemerintah daerah (*agen*) bertanggung jawab kepada masyarakat (*principle*), karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain [30]. Bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Dan dana alokasi umum merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintahan pusat, maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan pelayanan publik bahwa bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. [31]

H₃: PAD dan DAU berpengaruh secara simultan positif signifikan terhadap belanja modal. Sesuai dengan penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian, maka dapat kita buat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat mengenai dua variabel atau lebih[32]. Penelitian ini menguji tentang hubungan antara variabel independen PAD dan DAU dengan variabel dependen (BM). Populasi penelitian ini berupa seluruh pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, selama dua tahun yaitu dari tahun 2019-2020[33] menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan belanja modal. Variabel. Independen dalam penelitian ini antara lain Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah ABM (Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten atau kota selama tahun 2019-2020. Teknik yang digunakan adalah sampling jenuh, karena jumlah sampel yang sedikit dan agar sample mampu merepresentasikan populasi. yang dijadikan sampel adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data-data yang lengkap pada laporan realisasi APBD yang tersedia di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan[34].

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui cara menengah. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan APBD 2019-2020 APBD yang diperoleh dari situs *web* Direktorat jendral Keuangan Pemerintah Daerah melalui situs *web* www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD 2019-2020, data dapat diperoleh sehubungan dengan jumlah realisasi anggaran belanja modal, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah[35]. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, uji *autokorelasi*, *analisis regresi*, uji t, uji F. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah diukur dengan total pendapatan pajak daerah, perpajakan daerah, hasil pengelolaan warisan daerah yang terpisah dan pendapatan yang valid lainnya (UU No. 33 tahun 2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang ditugaskan untuk tujuan kapasitas keuangan yang adil antara daerah untuk membiayai kebutuhan regional dalam konteks implementasi desentralisasi yang sesuai dengan ketentuan tersebutperaturan perundang-undangan (Permendagri No 33 tahun2019). Variabel ini diukur melalui jumlah dana alokasi umum yang diperoleh oleh wilayah kabupaten/kota di setiap tahun fiscal[36]. Menurut Permendagri Nomor 33 tahun 2019 belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi asset.[37] Belanja modal diukur dari total belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya (Permendagri No 33 tahun 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

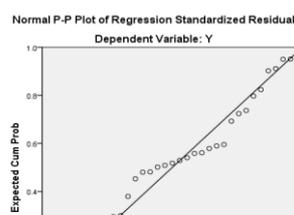
Berdasarkan tabel diatas bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2019- 2020: PAD menunjukkan nilai minimum sebesar 220.00 nilai maksimum sebesar 2025.00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 417.6571 dan stanndar deviasi sebesar 296.55452. DAU menunjukkan nilai minimum sebesar 417.00, nilai maksimum sebesar 1307.00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 911.0571 dan standar deviasi sebesar 233.87314 Belanja Modal yang menunjukkan, nilai minimum sebesar 102.00 nilai maksimum sebesar 506.00 nilai rata-rata (mean) sebesar 254.8000, dan standar deviasi sebesar 104.58934.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	35	220.00	2025.00	417.6571	296.55452
DAU	35	417.00	1307.00	911.0571	233.87314
ABM	35	102.00	506.00	254.8000	104.58934
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Output SPSS

Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikannya $> 0,05$ begitu juga sebaliknya tingkat signifikan $< 0,05$, maka tidak normal. Berdasarkan data pada gambar 1 di bawah gambar *probably plot of regression* menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis ordinal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini normal karena terlihat bahwa titik data menyebar rmengikuti arah garis diagonal.



Gambar 1. Uji Multikolinieritas

Jika VIF di bawah atau < 10 dan Tolerance value di atas $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Maka interpretasinya: berdasarkan table data di bawah diketahui bahwa nilai VIF variabel PAD (X_1) dan variabel DAU (X_2) adalah $1,131 < 10$ dan nilai Tolerance value $0,884 > 0,1$ maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

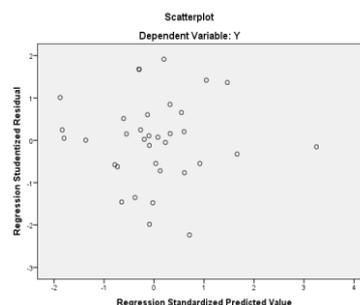
Tabel 2. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-26.445	49.240		-.537	.595		
1 X ₁	.115	.044	.326	2.615	.014	.884	1.131
X ₂	.256	.056	.573	4.595	.000	.884	1.131

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS

Pada uji ini peneliti menggunakan *scatterplot* dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah dan titik membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan bagan diagram Scatterplot sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, dan titik meluas di atas dan di bawah angka 0 pada y sumbu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari uji heteroskedastisitas.



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi yaitu dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson* atau *DW test*. Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai *Durbin-watson* (d) sebesar 1.083 dengan tingkat signifikansi 5%, dengan total sampel (n) 35, dan k variabel independen (k) sebanyak 2, maka diperoleh $dl = 1.3433$; $du = 1.5838$. Dengan demikian menunjukkan nilai tabel $d < dl$, yaitu $1.083 < 1.3433$ sehingga terdapat autokorelasi positif.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN DI JAWA TENGAH
(NURUL FITRIYANI, HILDA KUMALA WULANDARI, RONI, ANDI YULIANTO, SLAMET BAMBANG RIONO)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749a	.561	.533	71.43555	1.083

Sumber: Output SPSS

Hasil persamaan uji regresi linier berganda yaitu: $Y = -26.445 + 0,115 \text{ PAD} + 0,256 \text{ DAU}$. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar -26.445. Hal ini berarti bahwa ketika nilai variabel bebas PAD (X_1), DAU (X_2) naik, maka nilai variabel terikat belanja modal (Y) akan turun sebesar -26.445. Koefisien regresi PAD (X_1) sebesar 0,115, menunjukkan bahwa jika PAD (X_1) mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai belanja modal (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,115. Dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi DAU (X_2) sebesar 0,256, hal ini menunjukkan bahwa jika DAU (X_2) mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai Belanja Modal (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,256. Dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Tabel 4. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	208626.407	2	104313.204	20.441	.000b
Residual	163297.193	32	5103.037		
Total	371923.600	34			

Sumber: Output SPSS

Pada hasil uji F yaitu dengan cara membandingkan hasil dan nilai signifikan uji F dengan alpha 5%. Jika nilai signifikan uji F menunjukkan lebih kecil dari alpha 5%, maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya jika hasil atau nilai signifikan uji F menunjukkan lebih besar dari alpha 5%, maka hipotesis yang di ajukan di tolak atau tidak diterima. Oleh karena itu berdasarkan hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 20.441 dan nilai signifikan 0,000 $P < 0,05$. Hal ini berarti PAD, DAU secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 5. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-26.445	49.240			-.537	.595
PAD (X_1)	.115	.044	.326		2.615	.014
DAU (X_2)	.256	.056	.573		4.595	.000

Sumber: Output SPSS

Pada penelitian ini untuk variabel PAD berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 2,615 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$, hal ini berarti variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian ini untuk variabel DAU berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 4.595, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 p < 0,05$. Hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 2.615 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,014 p < 0,05$, hal ini berarti variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima. Hasil penelitian ini membuktikan sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa semakin tinggi PAD maka semakin besar juga alokasi belanja modal. Besarnya belanja modal akan diperoleh dari besar atau kecilnya PAD menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal [38]. Penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 4,595 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 p < 0,05$, hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa H₂ diterima. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dan bahwa semakin tinggi DAU, maka belanja modal juga akan semakin meningkat. Hal penelitian ini sesuai dengan hasil [39] serta [40] menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian serta analisis yang telah di jalankan maka peneliti dapat mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal. Disimpulkan bahwa secara simultan dari hasil penelitian terhadap masing-masing variabel PAD dan DAU dapat disimpulkan sebagai berikut. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Yang artinya apabila semakin tinggi PAD yang diterima oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula BM yang akan dianggarkan oleh daerah tersebut; DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Yang artinya semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Sedangkan untuk secara parsial dapat disimpulkan yaitu PAD, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di provinsi Jawa tengah tahun 2019-2020.

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran berikut. Pemerintah kota Jawa Tengah harus lebih lanjut memaksimalkan dana APBD dan dana alokasi umum sehingga pemerintah masih perlu meningkatkan pengeluaran modal karena pembangunan dalam peraturan kota di Jawa Tengah masih membutuhkan kebijakan pemerintah dalam kasus infrastruktur, untuk meningkatkan Kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, pemerintah kabupaten Jawa Tengah. Harus lebih memaksimalkan dana APBD dan dana alokasi umum, yang ditugaskan ke daerah tertentu dengan tujuan membantu membiayai kegiatan khusus yang bersifat daerah. Masalah dan sesuai dengan prioritas nasional dan pemerintah kabupaten/kota Jawa Tengah mereka harus meningkatkan pendapatan asli dari masing-masing wilayah, sehingga ketergantungan pemerintah daerah di pemerintah pusat dalam hal keuangan dapat dimaksimalkan untuk implementasi daerah. Pemerintah harus melakukan upaya untuk mengintensifkan dan memperluas sumber pendapatan lokal yang mungkin sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. I. Lili Nur Intan Findhy Dwita Kumala, Roni, Dumadi, "Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Arum Manis UKM Dio di Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 95–105, 2019.
- [2] M. Veronika Hutapea Hilda Kumala Wulandari, Roni, Anisa Sains Kharisma, "Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa dan Ketaatan Peraturan Perundang-undangan terhadap Kualitas Kinerja Bendahara Desa," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 33–44, 2019.
- [3] A. Saripin, A. Indriyani, A. S. Kharisma, S. Musdalifah, dan H. K. Wulandari, "Analisis Volume Penjualan, Biaya Operasional dan Harga Kamar terhadap Laba Bersih (Studi Empiris pada Grand Dian Hotel Brebes Tahun 2017 – 2018)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 15–24, 2019.
- [4] Y. E. Erika Oktavia Azizah Indriyani, Titi Rahmawati, Anggi Ayu Saputra, "Pengaruh Biaya Produksi dan Penjualan terhadap Laba Bersih pada Rocket Chicken Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–14, 2019.
- [5] T. R. Muhammad Kuntoro Dwi Harini, Muhammad Badrun Zaman, Amelia Sholeha, "Pengalihan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 64–73, 2019.
- [6] H. K. W. Azizah Anisa Sains Kharisma, Indah Dewi Mulyani, Nur Afridah, "Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Harga Saham (Study Empiris pada Perusahaan

- Manufaktur),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 53–63, 2019.
- [7] M. Tuti Alawiyah Andi Yulianto, Anisa Sains Kharisma, Yenny Ernitawati, “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 71–80, 2019.
- [8] H. K. W. Aldi Prayoga Anisa Sains Kharisma, Yenny Ernitawati, Nasiruddin, “Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Penjualan dalam Meningkatkan Laba Bersih,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 17–24, 2019.
- [9] A. Y. Sholikhha Puji Astuti Dumadi, Amelia Sholehah, Maftukhin, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu terhadap Kredit Macet (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Masyarakat Kertasinduyasa),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 45–52, 2019.
- [10] A. S. K. Ririn Widia Astuti Roni, Dumadi, Nasiruddin, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 85–95, 2019.
- [11] S. I. Murdiono Muhammad Syaifulloh, Roby Setiadi, Roni, “Pengaruh Marketing Mix, Kualitas Pelayanan dan Citra Merk terhadap Keputusan Pembelian Produk Piston,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 72–82, 2019.
- [12] Y. E. Irna Roseniati Roni, Muhammad Badrun Zaman, Titi Rahmawati, “Mengukur Kinerja Keuangan PT BNI (Persero) Tbk dengan Menggunakan Rasio Keuangan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 96–110, 2019.
- [13] Diantoro, A. N. PDW, A. Kristiana, K. Iskandar, dan S. Ikhwan, “Analisis Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Komitmen Affective terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris di PT Nagamas Surya Kencana Tegal),” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 14–22, 2019.
- [14] A. Candra, H. Sucipto, D. Harini, N. Nasiruddin, R. Roni, dan A. Mutaqin, “Pemberdayaan UMKM Angkringan Milenial melalui Legalitas Usaha di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes,” *Kreat. J. Pengabd. Masy. Nusant.*, vol. 2, no. 2, hal. 76–84, 2022.
- [15] T. Alfina, A. Kristiana, I. D. Mulyani, K. Iskandar, dan A. Indriyani, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PO Dedy Jaya Brebes Tahun 2016–2018),” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 23–32, 2019.
- [16] L. Ulfa, A. Yulianto, G. F. Dwi Harini, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja, Budaya organisasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PD BKK Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 41–52, 2019.
- [17] L. Istifana, Muhammad, A. N. P. Syaifulloh, H. Sucipto, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan di Toko Mebel Sinar Jaya, Losari, Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 3–40, 2019.
- [18] N. Khoeriyah, A. Indriyani, I. D. Mulyani, N. Aisyah, dan A. Yulianto, “Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 83–91, 2019.
- [19] S. B. Riono dan W. Wibowo, “Upaya Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswadi Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Brebes,” *Syntax Lit.*, vol. 4, no. 5, hal. 92–98, 2019.
- [20] J. Hikmah, M. Syaifulloh, N. Khojin, N. Aisyah, dan S. B. Riono, “Pengaruh Faktor Kompetensi Individu, Faktor Dukungan Organisasi, Faktor Dukungan Manajemen terhadap Kinerja Pegawai,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 53–65, 2019.
- [21] H. K. W. Ahmad Faozan Heru Subagja, Andi Yulianto, Slamet Bambang Riono, “Pengaruh Biaya Promosi dan Harga Jual terhadap Volume Penjualan pada Yamaha Agung Motor Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 74–84, 2019.
- [22] R. Roni dan D. Dumadi, “Kebijakan Kepala Daerah dalam Pembangunan Ekonomi

- Pedesaan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 2, hal. 4438–4455, 2022.
- [23] Y. Ernitawati, N. Izzati, dan A. Yulianto, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan Pasar Modal,” *J. Proaksi*, vol. 2, no. 2, hal. 66–81, 2020.
- [24] A. Yulianto, R. Setiadi, dan R. Roni, “Entrepreneurship Model: Attributes of Entrepreneurial Intention Between Exact And Non-Exact Students,” *E-Bisnis J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 13, no. 2, hal. 183–193, 2020.
- [25] N. Fadlilah, S. B. Riono, D. Harini, A. Yulianto, dan Mukson, “Studi Kausal Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 66–71, 2019.
- [26] A. Yulianto, M. Mukson, O. S. Bachri, S. B. Riono, dan Y. Ernitawati, “Manajemen Tatakelola BUMDES: Mengelola Pemasaran Produk,” *JAMU J. Abdi Masy. UMUS*, vol. 1, no. 01, 2020.
- [27] R. Roni, S. Musdalifah, Y. Ernitawati, dan S. Ikhwan, “Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah:(Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 01, 2020.
- [28] R. Roni, A. Yulianto, dan M. Maftuhin, “Dampak Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Banjarharjo Kab. Brebes,” *J. Ilmu Manajemen, Ekon. dan Kewirausahaan*, vol. 1, no. 2, hal. 8–14, 2021.
- [29] R. Evatul Djannah Maftukhin, Dwi Harini, Indah Dewi Mulyani, “Analisis Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 25–32, 2019.
- [30] R. Roni dan H. C. E. Putri, “The Effect of Production Costs and Selling Prices on Net Profit (Case Study on Harum Manis Dio Household Industry, Cigadung Village, Brebes Regency),” *J. Ekon.*, vol. 11, no. 03, hal. 990–996, 2022.
- [31] R. R. Umamatul Khoeriyah Syariefful Ikhwan, Roby Setiadi, Mohammad Badrun Zaman, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 81–94, 2019.
- [32] D. N. Khomariyah, R. Masrikhiyah, dan R. Roni, “Penyuluhan Pengembangan Bentuk Kemasan Produk Keripik Pisang untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Pelaku UMKM di Desa Banjarharjo, Brebes,” *Prof. J. Abdimas*, vol. 1, no. 4, hal. 8–15, 2022.
- [33] N. Kiman, M. Syaifulloh, A. N. D. Wahana, G. Fitralisma, dan S. B. Riono, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Depot Air Minum Isi Ulang UD Enzes Pengabean,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 92–101, 2019.
- [34] M. Dewi Ningsih Indah Dewi Mulyani, Ayusa Nitasari, Amelia Sholeha, “Pengaruh Turnover dan Inventory Turnover Terhadap Perubahan Laba pada Perusahaan Pertambangan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 1–16, 2019.
- [35] R. R. Rais Puji Rahayu Andi Yulianto, Titi Rahmawati, Slamet Bambang Riono, “Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 38–48, 2019.
- [36] Y. Ernitawati dan M. Maftuhin, “Analisis Tren Pertumbuhan Penjualan terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi pada Waralaba Restoran Siap Saji di Kabupaten Brebes Tahun 2018),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 01, 2020.
- [37] R. Roni dan D. Pangestu, “Pengaruh Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham (Studi di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 01, 2020.
- [38] D. Yoga, A. Indriyani, R. Setiadi, N. Khojin, dan A. Yulianto, “Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pusat Statistik (BPS) Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–13, 2019.

- [39] S. Amelia Sari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta Ayu,” vol. 549, no. 02, hal. 40–42, 2017.
- [40] J. Montolalu, “Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,” *Gastron. ecuatoriana y Tur. local.*, vol. 1, no. 69, hal. 5–24, 1967.